

STABILITAS EKONOMI INDONESIA DALAM PANDEMI COVID-19 DAN POTENSI INDONESIA UNTUK TERJEBAK MIDDLE INCOME TRAP

Vellix Wanggai¹
Mariane Olivia Delanova²
Yanyan M Yani³

Universitas Jenderal Achmad Yani^{1,2,3}

*Jalan Terusan Jend. Sudirman, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota
Cimahi, Jawa Barat 40531*

Alamat email koresponden: velixwanggai2@gmail.com

ABSTRACT

This article will focus on the impact of the Covid-19 pandemic on Indonesia's economic conditions. Researchers realize that solid economic stability will lead the country to achieve public welfare and achieve the ideal form of government, therefore research on the impact of the pandemic on the economic stability of a country is something important to do. The decline of Indonesia's status to a lower middle income country in mid-2021 has become a clear warning for Indonesia to improve in handling Covid-19, poor handling will have implications for the wheels of the Indonesian economy which may plunge Indonesia into a middle income trap. The results of the study show that the transformation of the economy towards a knowledge-based economy will be the right step to maintain economic stability during the pandemic because of its more resilient nature.

Keywords: *Economy, Indonesia, Covid-19 Pandemic, Middle Income Trap, New Variant.*

PENDAHULUAN

Menjaga stabilitas ekonomi merupakan salah satu syarat bagi negara sebagai aktor internasional untuk dapat mencapai kesejahteraan dan pemerintahan yang ideal (*good Governance*) yang mampu menjalankan peran dan fungsi dasarnya (Masita, 2019). Akan tetapi terjadinya peristiwa tidak terduga seperti pandemi, dapat menjadi tantangan besar bagi negara untuk dapat mempertahankan stabilitas tersebut. Artikel ini akan mengulas bagaimana Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di

dunia berupaya mewujudkan stabilitas ekonomi di tengah pandemi Covid-19 yang telah sejak awal tahun 2020. Peneliti berargumentasi bahwa proses-proses penyesuaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi perkembangan isu pandemi Covid-19, akan mengganggu upaya Indonesia untuk mencapai stabilitas ekonomi. Selain itu besar kemungkinan bahwa kondisi ini akan membawa Indonesia kedalam *middle income trap*.

Untuk memulai peneliti akan kembali pada pertama kali pandemi dimulai atau tepatnya pada bulan Desember tahun 2019. Pada waktu tersebut, dunia digemparkan oleh sebuah kasus *pneumonia* (peradangan paru-paru) yang asal-usul penularannya tidak diketahui dan teridentifikasi di salah satu kota di China, yakni Kota Wuhan (CNN Indonesia, 2021). Menanggapi hal tersebut, China kemudian pada tanggal 7 Januari 2020 menyatakan bahwa penyakit tersebut merupakan jenis baru dari *coronavirus*. Penularan yang begitu cepat membuat negara tirai bambu tersebut mengeluarkan pernyataan '*Urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*' terhadap peristiwa penemuan varian baru penyakit pneumonia ini melalui *Wuhan Health Committee* (WHC) (Hanoatubun, 2020). Virus ini kemudian ditemukan juga dapat menyebar pada manusia dan juga hewan, yang mana dalam penyebarannya virus ini menyerang saluran pernapasan pada manusia dengan gejala awal flu. Penyebaran penyakit ini juga dapat ditemukan melalui tetapan pernapasan (*droplet*) dari bersin maupun batuk. Seperti juga ungkapkan oleh *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan bahwa virus covid ini adalah virus yang menyebabkan flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti sindrom pernapasan timur tengah atau *Middle East Respiratory Syndrome-related Coronavirus* (MERS-CoV) dan juga sindrom pernafasan akut parah *Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus* (SARS-CoV) (Whitworth, 2020: 27). Pada 11 Maret 2020 WHO mengeluarkan

pengumuman mengenai situasi wabah yang menggemparkan dunia saat ini sebagai *Global Pandemic* (WHO, 2020). Peningkatan jumlah kasus dan juga penyebaran kasus Covid-19 ini terjadi dengan waktu yang sangat cepat dan telah menyebar di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.

Dalam merespon pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi internasional yang ada. Penyesuaian itu sendiri dari waktu ke waktu mengalami banyak perubahan pula, tergantung bagaimana dengan situasi saat itu, mengingat pandemi dan juga penyebaran virus baru ini tidak dapat diprediksi. Dimana diantaranya ialah dengan menetapkan kebijakan penerapan protokol kesehatan di berbagai tempat sesuai himbauan dari WHO, melakukan berbagai penyediaan fasilitas kesehatan bagi pasien yang terserang virus Covid-19 serta memberlakukan kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) yang kemudian istilahnya terus bertransformasi mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Hanifa & Wajuba, 2021: 9-11).

PEMBAHASAN

Imbas Kebijakan Penanggulangan yang Belum Optimal

Pada praktiknya, berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan situasi yang cepat akibat pandemi Covid-19 tidak menunjukkan hasil yang sesuai dengan diharapkan. Baik dari sisi masyarakat yang angka kepatuhannya terhadap pembiasaan aturan baru masih rendah ataupun kebijakan pemerintah yang senantiasa mengalami perubahan menyesuaikan dengan keadaan dan terkesan *plin-plan* atau tidak tetap. Kedua hal tersebutlah yang kemudian menjadi penyebab dari ketidak-efektifan upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran virus. Padahal masa pemberlakuan kebijakan pembatasan relatif panjang. Kebijakan ini juga membuat banyak

aspek menjadi lumpuh karena adanya larangan bagi kegiatan masyarakat khususnya perkantoran dan sebagian besar industri untuk beroperasi. Kondisi inilah yang kemudian membawa Indonesia kedalam kondisi terganggunya produksi barang dan jasa yang secara tidak langsung juga berkontribusi pada kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat dan Indonesia secara menyeluruh (Yamali & Noviyanti, 2020: 386).

Kekhawatiran terhadap dampak ekonomi juga tidak selesai disitu saja. Pandemi yang diyakini belum berakhir hingga beberapa tahun kedepan masih akan menimbulkan pertanyaan, bukan hanya tentang kapan berakhirnya, ataupun varian virus apalagi yang dapat muncul, tetapi juga tentunya kemudian dampak apalagi yang dapat disebabkan dari fenomena ini khususnya di sektor perekonomian Indonesia. Apalagi jika memperhatikan bahwa Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sempat menyatakan bahwa *“The pandemic is a once-in-a-century health crisis, the effects of which will be felt for decades to come”* (Kemenkeu RI, 2021: 14). Angka vaksinasi yang juga terus meningkat memang menjadi angin segar terhadap jaminan kesehatan masyarakat dunia begitupula Indonesia. Hal itu juga lambat laun dapat secara tidak langsung memulihkan atau kembali secara bertahap memutar kembali roda perekonomian Indonesia yang sempat berada di situasi krisis dan bahkan mengalami kemerosotan karena Indonesia kembali mengalami degradasi status Per 1 Juli 2021, dimana World Bank mengumumkan status kelas Indonesia dari negara berpenghasilan menengah atas atau *upper middle income country*, Kembali menjadi negara berpenghasilan menengah ke bawah atau *lower middle income country* (Intan, 2021).

Varian Baru dan Kondisi Ketidakpastian yang Semakin Panjang

Seolah tidak memberikan waktu lama, pandemi Covid-19 yang sebelumnya diperparah dengan penyebaran varian virus Delta sebagai *variant of concern* dari WHO karena transmisibilitas yang cukup tinggi dan

cepat (WHO, 2021). Pandemi kembali memunculkan ancaman baru melalui temuan varian baru virus Covid-19 lainnya, yaitu varian Omicron. WHO kemudian menindak lanjuti dengan memberikan peringatan bahwa varian virus covid Omicron ini berisiko menimbulkan lonjakan penularan di seluruh dunia. Meskipun begitu Pemerintah Indonesia terbilang tanggap dalam menyikapi terkait permasalahan ini. Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan larangan bagi orang asing dengan riwayat perjalanan dari negara-negara Afrika bagian selatan dan Hongkong untuk masuk ke wilayah Indonesia demi mencegah penyebaran varian baru ini (BBC, 2021). Meski demikian, tetap saja varian virus Covid-19 baru ini harus menjadi salah satu hal yang diwaspadai, terlebih setelah akhirnya varian ini mulai teridentifikasi di Indonesia pada tanggal 15 Desember 2021 (Satria, 2022).

Cara terbaik dalam menghadapi ketidakpastian akibat penyebaran varian Omicron adalah dengan melakukan pencegahan. Salah satu upaya pemerintah Indonesia adalah ditetapkannya, kebijakan karantina terhadap setiap Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang masuk ke Indonesia dengan masa karantina terbaru ialah 7x24 jam. Kebijakan ini juga berlaku bagi Warga Negara Asing (WNA) yang masuk ke Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.34/2021 yang juga disesuaikan dengan skema perjanjian bilateral maupun multilateral seperti *Travel Corridor Arrangement (TCA)* (Kemlu.go.id, 2020). Ketetapan ini telah melalui berbagai pertimbangan antara stakeholder terkait dengan juga menerapkan eksepsi bagi individu yang memperoleh izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga. Pemerintah juga menanggung biaya karantina terpusat untuk Warga Negara Indonesia (WNI) yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali lebih dari 14 hari ke Indonesia, pelajar/mahasiswa yang kembali ke Indonesia, pegawai pemerintah yang kembali dari perjalanan

dinas, dan juga perwakilan Indonesia di ajang perlombaan/festival internasional. Biaya karantina terpusat menjadi tanggungan mandiri apabila WNI di luar kriteria yang dimaksudkan sebelumnya dan juga WNA diplomat asing di luar kepala perwakilan asing dan keluarga (Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2022).

Melalui Surat Edaran Satuan Tugas (SE Satgas) Penanganan Covid-19 Nomor 2 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri pada Masa Pandemi Covid-19 yang diberlakukan mulai 12 Januari 2022 syarat pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke Indonesia diperbaharui. Dalam membentuk sistem kesehatan yang baik tentu dibutuhkan sinergitas dari setiap unsur penting yang ada (Balabanova, Lesong, & McKee, 2011: 271), baik dari sisi masyarakat dengan memahami serta mematuhi peraturan protokol kesehatan yang sudah ada, maupun dari sisi pemerintah yang memiliki wewenang dan kewajiban dalam meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan dari naiknya kasus penyebaran virus Omicron. Sistem kesehatan dan stabilitas ekonomi akan menjadi aspek yang sangat vital karena akan memiliki hubungan kausal dari keberhasilan maupun kegagalan dalam penanggulangan penyebaran varian Omicron. Perekonomian yang terganggu akan memberikan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung kepada kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian pada bagian selanjutnya, peneliti akan mengidentifikasi dampak yang dapat ditimbulkan dari adanya transmisi virus Covid-19 varian Omicron dan pandemi secara keseluruhan terhadap sektor perekonomian Indonesia.

Perekonomian Indonesia Dikala Pandemi

Semenjak tahun 2020, virus Covid-19 menjadi salah satu hal yang diberi proporsi perhatian yang cukup besar oleh Pemerintah serta masyarakat Indonesia. Kerugian demi kerugian yang ditimbulkan dari adanya pandemi ini secara langsung menyerang sendi-sendi perekonomian

negara Indonesia. Setelah mengalami peningkatan kasus penyebaran virus yang melesat dalam kurun waktu yang terbilang singkat, pemerintah membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi penyebaran virus covid-19, dan tidak dapat disangkal bahwa peraturan tersebut berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat karena peraturan yang ada berkaitan dengan pembatasan kegiatan manusia. Kebijakan yang ada terus bertransformasi dari mulai bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan secara nasional hingga kini menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan merujuk kepada tingkat infeksi dan resiko dari setiap daerah. Seluruh kebijakan tersebut memiliki landasan utama hukum yakni Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020.

Dampak dan pengaruh yang timbul bagi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19, antara lain :

- a. Terjadinya PHK besar-besaran. Dimana tercatat lebih dari 1,5 juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
- b. Terjadinya penurunan PMI *Manufacturing* Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020.
- c. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
- d. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year* (yoy) yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada maret 2020.
- e. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor terkait. Kerugian ditaksir mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari-Maret 2020.

- f. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata) (Hanoatubun, 2020).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara massal tentu menjadi cerminan nyata dari dampak wabah Covid-19 terhadap perekonomian dan Industri di Indonesia. Banyak perusahaan yang terpaksa merumahkan karyawan mereka karena dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit karena ancaman kebangkrutan terus mengintai mereka. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa sekitar 114.340 perusahaan telah melakukan PHK dan merumahkan tenaga kerja dengan total pekerja yang terkena telah mencapai angka 1.943.916 orang perusahaan dengan persentase 77% sektor formal dan 23% dari sektor informal (Indraini, 2020). Akibat hal tersebut, aspek-aspek lain juga terkena dampaknya, diantaranya pekerja harian lepas, pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), usaha restoran dan usaha lain yang melibatkan orang banyak, karena penurunan daya beli masyarakat secara drastis. Kondisi tersebut membuat perputaran uang menjadi sangat minim ditengah masyarakat sehingga produksi barang akan terbatas dan menyebabkan defisit perdagangan (Kurniawansyah, Amrullah, Salahuddin, Muslim, & Nurrhidayati, 2020). Dengan serta merta kondisi ini menciptakan fenomena kegagalan pasar dan berhentinya roda perekonomian masyarakat.

Secara regional dampak dari Covid-19 terhadap perekonomian menghentikan usaha hampir 24 juta orang di Asia Timur dan Pasifik. Bank Dunia juga memperkirakan hampir 35 juta orang akan tetap dalam kemiskinan akibat kondisi ini (Worldbank.org, 2022), dan dengan adanya pernyataan tersebut maka sejumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga dihadapkan pada kondisi sulit karena harus dipulangkan. Bank Dunia juga memperkirakan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim akan meningkat hingga menembus angka 922 juta di seluruh dunia

(Worldbank.org, 2022). Terganggunya sektor perekonomian Indonesia yang diakibatkan oleh situasi pandemi covid-19 ini yang juga mendisrupsi mekanisme pasar bukan hanya berdampak pada aspek sektor riil saja. Mekanisme pasar yang terganggu diprediksi akan melenyapkan surplus ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar sehingga akan mempengaruhi struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang panjang. Aspek-aspek vital dalam perekonomian antara lain *supply*, *demand* dan *supply-chain* juga ikut terkena dampaknya. Dengan demikian gangguan terhadap ketiga aspek tersebut, dapat memicu terjadinya krisis ekonomi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap dampak ekonomi akibat pandemi ini adalah masyarakat dengan pendapatan utama yang dihasilkan dari pendapatan harian (Iskandar, Taufiq, & Aqbar, 2020: 628).

Dalam sektor perbankan dan pariwisata misalnya, pemerintah Indonesia terpaksa mengambil kebijakan mengenai aturan suku bunga dan memberikan diskon bagi harga tiket penerbangan karena pergerakan nilai tukar dan harga minyak yang terkontraksi secara terus menerus. Hal ini dilakukan agar masyarakat domestik tertarik untuk melakukan kunjungan wisata sebagai upaya pemulihan sektor pariwisata yang bergantung pada kedatangan turis asing. Ironisnya diakhir 2021 saja, pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menprekraf), Sandiaga Salahudin Uno, hanya menargetkan kunjungan dari 1,8 juta wisatawan asing (Rosana, 2021). Otoritas bursa juga terbilang sangat terdampak akibat kepanikan pandemi yang terjadi, tercatat banyak pihak terpaksa memutuskan untuk menghentikan transaksi *short selling* yang berguna untuk mengurangi tekanan yang dialami dan volatilitas yang tinggi di pasar saham tanah air (Burhanuddin & Abdi, 2020: 92-93). Ditengah pandemi Covid-19, Bank Indonesia berupaya untuk mempertahankan stabilitas perekonomian

nasional dengan berbagai cara, namun perekonomian Indonesia menurun hingga 5% dan selama pandemi terus berkembang tanpa bisa dihentikan maka kemungkinan besar perekonomian akan mengalami penurunan lanjutan.

Pelemahan indeks harga saham secara signifikan di masa pandemi terbukti membuat beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengalami kerugian yang besar. Menteri BUMN, Erick Thohir, bahkan sempat memaparkan bahwa di masa pandemi Covid-19 terdapat sembilan klaster perusahaan pelat merah yang mencatat kerugian. Meskipun tercatat terdapat empat klaster BUMN lainnya masih membukukan kinerja positif tetap saja kondisi ini benar-benar menyakiti perekonomian Indonesia mengingat selama 10 tahun terakhir saja, BUMN telah berkontribusi terhadap pajak, PNBPN, dan dividen dengan nilai mencapai Rp 3.282 triliun. Wajar saja jika kemudian pertumbuhan ekonomi di Indonesia diprediksi akan mengalami perburukan hingga hanya mencapai minus 2,5%, jika pandemi Covid-19 ini berlangsung dalam waktu yang lama (Merdeka.com, 2020).

Omicron dan Perekonomian Indonesia

Varian baru virus covid-19, omicron. Varian baru ini juga baru-baru ini menimbulkan banyak kegelisahan. Varian omicron sendiri kini menjadi ancaman yang nyata setelah keberadaannya ditemukan di Indonesia. Terlebih Kementerian Kesehatan melaporkan jumlah kasus varian Omicron yang melibatkan pelaku perjalanan luar negeri maupun transmisi lokal di Indonesia telah bertambah menjadi 748 orang terhitung tanggal 17 Januari 2022 (CNN Indonesia, 2022). Hal ini menyalakan sinyal peringatan bahwa penularan yang terjadi di masyarakat perlu dijadikan fokus penanganan oleh pemerintah, sehingga varian Omicron tidak sampai menyebar sebelum strategi untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dapat disusun terlebih

jika skenario terburuk yang dapat terjadi akibat penularan ini benar-benar terjadi dalam beberapa waktu mendatang.

Meskipun Indonesia dianggap telah melewati masa kritis dari gelombang pandemi, Indonesia tetap harus waspada agar tidak mengulang kegagalan-kegagalan yang terjadi pada awal pandemi Covid-19. Terlepas dari belum adanya konfirmasi pasti dari seberapa parah dampak dari varian Omicron ini, fakta bahwa kecepatan transmisi varian ini yang dipercaya lebih cepat dibandingkan varian sebelumnya yaitu varian Delta harus disikapi dengan tanggap dan sigap agar tidak menimbulkan masalah yang akhirnya melumpuhkan kegiatan perekonomian Indonesia. Sinergitas antara masyarakat sebagai sasaran kebijakan dan juga pemerintah yang merumuskan aturan / kebijakan, harus terus ditingkatkan karena menjadi satu hal yang vital untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan berbagai pihak (Balabanova, Lesong, & McKee, 2011). Wajar saja jika kemudian Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen juga sempat menyatakan bahwa *“Selain pentingnya respon kesehatan masyarakat yang kuat, juga sangat penting untuk mempertahankan upaya reformasi struktural. Hal ini akan mempercepat pertumbuhan walaupun pihak yang berwenang mulai mengurangi dukungan makroekonomi secara bertahap”* (Worldbank.org, 2021).

Dalam membantu perekonomian masyarakat, pemerintah memang terus melakukan percepatan dalam penyaluran ragam bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat (Kemenkopmk.go.id, 2021). Akan tetapi, tanpa diiringi dengan skema-skema kebijakan yang tepat untuk meminimalisir dampak pandemi, maka upaya perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia akan menjadi sesuatu yang sia-sia, belum lagi jika tidak cermat dalam menerapkan kebijakan pelonggaran, maka masyarakat Indonesia masuk pada fase kerentanan tinggi. Angka vaksin di Indonesia memang dilaporkan sudah berada di angka 85,30% (Dosis 1) dan 58,14% (Dosis 2)

(Kemkes.go.id, 2022) namun angka tersebut tidak dapat dijadikan patokan utama atas potensi *community transmittion* di masyarakat.

Tingkat vaksinasi yang dinarasikan oleh pemerintah sebagai sebuah capaian, harus terus ditingkatkan oleh Indonesia dan jangan sampai menjadi capaian yang justru membuat Indonesia merasa aman dari ancaman pandemi yang masih mengintai. Tingginya angka vaksinasi seharusnya membuat Indonesia memiliki proporsi yang lebih besar dalam pertimbangan terkait strategi pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi. Bank Dunia bahkan sudah memperhitungkan akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia akibat Omicron. Menurut laporan *Global Economic Prospects* terbaru Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan melambat menjadi 4,1% pada tahun 2022 dari level 5,5% pada tahun 2021. Faktor utama yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang akan terjadi adalah menyebarnya varian Omicron di berbagai negara di dunia. Situasi ini pula yang dipercaya dapat membuat banyak negara kembali melakukan pengetatan pergerakan orang yang membuat laju pertumbuhan ekonomi terhambat. Selain itu, perlambatan yang mencolok juga terjadi di negara-negara ekonomi utama dunia termasuk AS dan China, dimana hal tersebut dapat membebani permintaan eksternal di negara-negara berkembang (Jannah, 2022).

Mengacu pada pernyataan Bank Dunia tersebut transmisi varian Omicron ini tentu dapat juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Bukan tidak mungkin apabila penyebaran di dunia ini tidak dapat terkendali, kegiatan perekonomian lintas negara seperti ekspor-impor akan terkena dampak langsung. Perkembangan varian Omicron di luar negeri juga dikhawatirkan memberikan dampak pada perekonomian nasional Indonesia dan ini menjadi tantangan besar bagi negara-negara di dunia. Pasalnya lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah negara, akan mengganggu aktivitas ekspor

nasional Indonesia, terlebih jika terjadi secara bersamaan kepada negara mitra dagang utama Indonesia (Nordiansyah, 2022).

Selain upaya-upaya internasional yang perlu dilakukan untuk tetap menjalankan roda perekonomian internasional, dalam membenahan dalam perekonomian lingkup domestik juga menjadi sama vitalnya. Penanganan terkait persebaran virus Omicron harus disegerakan oleh pemerintah guna mengantisipasi dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Pengetatan aturan mau tidak mau harus kembali dipertimbangkan, dengan tujuan untuk menekan gelombang besar penularan varian omicron yang mungkin akan meluumpuhkan kegiatan perekonomian Indonesia. Pencegahan ini juga menjadi suatu bentuk penanggulangan dari kesalahan Indonesia dalam meminimalisir penularan pada periode awal pandemi Covid-19 yang dianggap oleh beberapa pihak, salah satunya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebagai periode dimana pemerintah gagal menghadapi situasi krisis akibat pandemi (Lesmana, 2021). Semua upaya ini tentu memiliki tujuan besar dimana dengan pengetatan di awal seperti ini diharapkan dapat memudahkan pengendalian penyebaran varian baru agar pembatasan kegiatan perekonomian Indonesia yang juga merugikan masyarakat sebagai penggerak roda perekonomian tidak lagi berlarut-larut sehingga Indonesia juga dapat menghindari untuk terbenam dalam *Middle Income Trap*.

Ancaman Middle Income Trap

Middle income trap merupakan istilah yang mengacu pada keadaan dimana sebuah negara berhasil mencapai ke tingkat pendapatan menengah, namun mereka terjebak dalam posisi tersebut dan tidak dapat melangkah lebih jauh untuk menjadi negara maju (Glaw & Wagner, 2016: 507-508). *Middle income trap* menjadi isu yang menarik perhatian bagi negara-negara berkembang, mengingat negara-negara tersebutlah yang rentan untuk terjebak dalam jebakan tersebut. Dari sisi Indonesia, Menteri

Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada pertengahan 2021 telah menekankan pentingnya pemikiran serta strategi agar Indonesia tidak terperangkap dalam *middle income trap* dan mampu menjelma menjadi *high income country*. Sri Mulyani Indrawati juga menjelaskan bahwa pengalaman dari negara lain yang berhasil naik kelas menjadi *high income country* harus dapat dijadikan acuan bagi Indonesia untuk dapat mencatatkan capaian serupa (Kemenkeu.go.id, 2021).

Namun seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pandemi yang sedang berlangsung telah berdampak buruk bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini menjadikan langkah Indonesia untuk memperbaiki kondisi perekonomian menjadi semakin sulit. Apalagi jika melihat jaring pengaman sosial Indonesia yang di masa pandemi tercatat belum mampu mencakup keseluruhan masyarakat, misalnya saja dalam hal pemerataan vaksin. Padahal jaring pengaman sosial adalah formula dasar untuk memastikan bahwa masyarakat bisa maju bersama-sama secara adil namun tetap kompetitif dalam konteks sosial dan perekonomian (Glaw & Wagner, 2016: 531). Perdagangan internasional akan menjadi aspek krusial dalam meningkatkan perekonomian domestik Indonesia, oleh karena itu memastikan bahwa pasar domestik Indonesia dapat memproduksi dan menyerap barang dan jasa akan menjadi modal utama Indonesia untuk menerima manfaat dari ekonomi global.

Prediksi bahwa Indonesia akan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa dekade ke depan, merupakan suatu imej yang perlu dipertahankan oleh Indonesia dengan menangani pandemi secara tanggap. Sehingga membuat faktor-faktor makroekonomi yang juga ditentukan oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per Kapita Indonesia dapat terus ditingkatkan.

Bentuk transformasi ke arah *knowledge-based economy* yang tidak begitu terganggu dengan adanya pandemi juga akan menjadi krusial bagi

upaya Indonesia untuk terhindar dari *middle income trap*. Pertumbuhan ekonomi yang terus melemah akibat pandemi juga diperparah dengan meningkatnya hambatan perdagangan dan meningkatnya ketegangan geopolitik antar negara juga menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan penurunan tajam aktivitas manufaktur dan perdagangan global, sebaiknya disikapi dengan baik oleh negara *emerging economy* seperti Indonesia yang akan juga terimbas dari perlambatan ekonomi negara lainnya khususnya China dan AS yang memang menjadi mitra dagang besar bagi Indonesia.

SIMPULAN

Dari pembahasan mengenai dampak pandemi terhadap kondisi perekonomian Indonesia diatas dapat disimpulkan bahwa Indonesia masih harus terus berbenah dalam merespon pandemi yang ada. Munculnya varian baru Covid-19 atau varian Omicron juga menjadi permasalahan yang pelik dan jika tidak ditangani secara baik akan membenamkan posisi Indonesia yang sejatinya telah mengalami penurunan pada tahun lalu. Sinergitas diantar pemerintah dan masyarakat perlu untuk terus ditingkatkan, mengingat ancaman kerugian ekonomi akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Penanganan pandemi secara sigap dan terencana akan menjadi kunci dari perbaikan ekonomi Indonesia di masa depan, yang harus pula diiringi dengan transformasi perekonomian ke sektor yang lebih resilient di masa pandemi yakni *knowledge base economy* atau perekonomian yang sangat ditentukan oleh pengetahuan serta aksesibilitas informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Balabanova, D., Lesong, C., & McKee, M. (2011). The Contribution of Health Systems to Good Health. In D. Balabanova, A. Milss, & M. McKee, 'Good Health at Low Cost' 25 Years on What makes a sucessful health

- system?* (pp. 269-306). London: The London School of Hygiene & Tropical Medicine.
- BBC. (2021, November 29). *Apa itu Omicron : Hal-Hal yang Sejauh Ini Perlu Diketahui Tentang Varian Baru Virus Corona*. Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59453949>
- Burhanuddin, C. I., & Abdi, M. N. (2020). Ancaman Krisis Ekonomi Global dari Dampak Penyebaran Virus Corona (COVID-19). *AkMen*, 17, 90-98.
- CNN Indonesia. (2021, Agustus 4). *Jejak Pandemi Covid-19, dari Pasar hingga Mengepung Dunia*. Retrieved from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210804100935-113-676183/jejak-pandemi-covid-19-dari-pasar-hingga-mengepung-dunia>
- CNN Indonesia. (2022, Januari 17). *Omicron di Indonesia Naik Jadi 748, Transmisi Lokal 155 Kasus*. Retrieved from CNN Indonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220117114840-20-747498/omicron-di-indonesia-naik-jadi-748-transmisi-lokal-155-kasus>
- Farisa, F. C. (2022, Januari 14). *Aturan Lengkap Pelaku Perjalanan yang Baru Tiba di Indonesia, Wajib Karantina 7 Hari*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/14122061/aturan-lengkap-pelaku-perjalanan-yang-baru-tiba-di-indonesia-wajib-karantina?page=all>
- Fukuyama, F. (2013). What is Governance? *Governance: an International Journal of Policy, Administration, and Institution*, 26, 347-368.

- Glaw, L., & Wagner, H. (2016). The Middle-Income Trap: Definitions, Theories and Countries Concerned—A Literature Survey. *Comparative Economic Studies*, 58, 507–538.
- Hanifa, N., & Wajuba, L. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2, 9-19.
- Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Education, Psychology and Counselling*, 2, 146-153.
- Indraini, A. (2020, April 19). *Duh! Nyaris 2 Juta Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Gegara Corona*. Retrieved from Detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona>
- Intan, N. (2021, Juli 8). *Bank Dunia: Indonesia Turun Kelas Jadi Negara Menengah Bawah*. Retrieved from Repulika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/qvwdji368/bank-dunia-indonesia-turun-kelas-jadi-negara-menengah-bawah#:~:text=Bank%20Dunia%3A%20Indonesia%20Turun%20Kelas%20Jadi%20Negara%20Menengah%20Bawah,-Kamis%2008%20Jul&text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,menjadi%20n>
- Iskandar, A., Taufiq, B., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Islam Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Sosial Budaya Syar'I*, 7, 625-638.
- Jannah, S. M. (2022, Januari 17). *Saat Ekonomi Indonesia 2022 di Bawah Bayang-Bayang Varian Omicron*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/saat-ekonomi-indonesia-2022-di-bawah-bayang-bayang-varian-omicron-gnEm>
- Kemenkeu RI. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan Memahami Kerja Keras Pengawal APBN*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

- Kemenkeu.go.id. (2021, Agustus 8). *Ini Strategi Hindari Middle Income Trap di Buku Indonesia 2045*. Retrieved from Kemenkeu.go.id: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-strategi-hindari-middle-income-trap-di-buku-indonesia-2045/>
- Kemenkopmk.go.id. (2021, Agustus 6). *Penanganan Pandemi Covid-19 perlu Sinergi dan Gotong Royong Semua Pihak*. Retrieved from Kemenkopmk.go.id: <https://www.kemenkopmk.go.id/penanganan-pandemi-covid-19-perlu-sinergi-dan-gotong-royong-semua-pihak>
- Kemkes.go.id. (2022, Januari 18). *Vaksinasi COVID-19 Nasional*. Retrieved from Kemkes.go.id: <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>
- Kemlu.go.id. (2020, Agustus 26). *Travel Corridor Arrangement*. Retrieved from [Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/132/travel_corridor_arrangement](https://kemlu.go.id/portal/id/list/halaman_list_lainnya/132/travel_corridor_arrangement)
- Kurniawansyah, H., Amrullah, Salahuddin, M., Muslim, & Nurhidayati, S. (2020). Konsep Kebijakan Strategis Dalam Menangani Eksternalitas Ekonomi dari Covid-19 Pada Masyarakat Rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1, 130-139.
- Lesmana, A. S. (2021, Februari 3). *Walhi: Pemerintah Indonesia Gagal Atasi Pandemi Corona!* Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/news/2021/02/03/154814/walhi-pemerintah-indonesia-gagal-atasi-pandemi-corona>
- Masita, H. (2019, Maret 24). *Permasalahan Good Governance Di Indonesia Yang Banyak Terjadi*. Retrieved from Guru PPKN.com: <https://gurupkn.com/permasalahan-good-governance-di-indonesia>
- Merdeka.com. (2020, Desember 20). *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diprediksi Minus 2,5 Persen di 2020*. Retrieved from Merdeka.com:

- <https://www.merdeka.com/uang/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-diprediksi-minus-25-persen-di-2020.html>
- Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Benefita*, 5, 212-224.
- Nordiansyah, E. (2022, Januari 5). *Dampak Omicron ke Ekonomi RI Masih Minim, Pemerintah Diminta Tetap Waspada*. Retrieved from Medcom.id: <https://www.medcom.id/ekonomi/makro/akW9ZwMN-dampak-omicron-ke-ekonomi-ri-masih-minim-pemerintah-diminta-tetap-waspada>
- Rosana, F. C. (2021, Desember 27). *Target Wisatawan Asing 2022 Hanya 1,8 Juta, Sandiaga: Fokus Wisatawan Nusantara*. Retrieved from Tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1543806/target-wisatawan-asing-2022-hanya-18-juta-sandiaga-fokus-wisatawan-nusantara/full&view=ok>
- Satria. (2022, Januari 3). *Omicron Datang, Apa yang Harus Dilakukan?* Retrieved from Forum Berita Universitas Gajah Mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/22143-omicron-datang-apa-yang-harus-dilakukan>
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. (2022, Januari 15). *Masa Karantina Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang Masuk Indonesia Jadi 7 x 24 Jam*. Retrieved from Covid19.go.id: <https://covid19.go.id/artikel/2022/01/15/masa-karantina-pelaku-perjalanan-luar-negeri-yang-masuk-indonesia-jadi-7-x-24-jam>
- Whitworth, J. (2020). COVID-19 : A Fast Evolving Pandemic. *Trans R Soc Trop Med Hyg*, 114, 227-228.
- WHO. (2020). *COVID-19 Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) Global research and innovation forum*. Geneva: WHO.
- WHO. (2020, Maret 11). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. Retrieved from WHO.int:

<https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

WHO. (2021, Juli 5). *Delta variant*. Retrieved from WHO.int:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/media-resources/science-in-5/episode-45---delta-variant?gclid=CjwKCAiA0KmPBhBqEiwAJqKK4zMZ2_F_X77aXn6lgqsh2uaHM3gsLElrFS5XGLw2djo_VeqL0SHLrhoCQswQAvD_BwE

Worldbank.org. (2021, Desember 16). *Perekonomian Indonesia Mengalami Pertumbuhan di Tahun 2021 di Tengah COVID-19, Akan Berkembang pada Tahun 2022, Menurut Laporan Bank Dunia*. Retrieved from Worldbank.org: <https://www.worldbank.org/in/news/press-release/2021/12/16/indonesia-economy-grew-in-2021-despite-covid-19-will-accelerate-in-2022-world-bank-report-says>

Worldbank.org. (2022, Januari 1). *The World Bank Group's Response to the COVID-19 (coronavirus) Pandemic*. Retrieved from Worldbank.org: <https://www.worldbank.org/en/who-we-are/news/coronavirus-covid19>

Yamali, F. R., & Noviyanti, R. P. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Journal of Economics and Bussiness*, 4, 384-388.

Zulkipli, & Muharir. (2021). Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *JIMESHA : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, 1, 7-12.